

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Penelitian

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Keberhasilan pembangunan nasional tersebut sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia ini dilakukan melalui jalur pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dapat meningkatkan kualitas manusia. Manusia yang berkualitas merupakan modal yang sangat penting untuk kemajuan suatu bangsa.

Pendidikan yang berkualitas ditentukan oleh terselenggaranya proses pendidikan yang bermutu. Guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan untuk terselenggaranya proses pendidikan. Oleh karena itu kehadiran dan kiprahnya sangat berpengaruh dalam mewujudkan program pendidikan nasional. Agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien diperlukan seorang guru yang berkualitas. Guru harus memiliki kualitas yang memadai, karena guru merupakan salah satu komponen mikro sistem pendidikan dan banyak mengambil peran dalam proses pendidikan di sekolah. Guru merupakan pendidik yang bertugas dalam kegiatan intrakurikuler yang berhubungan dengan proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam kegiatan ekstrakurikuler guru juga bertugas membimbing dan melatih siswa yang memiliki kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan potensinya baik

dalam bidang ilmu pengetahuan, olahraga, kesenian serta bidang lainnya. Hal ini sesuai dengan Undang-undang RI no 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional Bab XI pasal 39, yang menyebutkan bahwa :

1. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelola, pengembang, pengawas, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
2. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di perguruan tinggi.

Guru merupakan garis terdepan dalam proses belajar mengajar. Karena guru berinteraksi langsung dengan siswa. Gurulah yang memegang peranan yang sangat penting dalam membuat siswa mengerti dan paham mengenai mata pelajaran yang diajarkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan membutuhkan guru yang tidak hanya berfungsi sebagai pengajar yang mengajarkan mata pelajaran tertentu kepada peserta didiknya tetapi juga sebagai pendidik yang memberikan bekal pengetahuan kepada siswanya mengenai etika, kemampuan untuk *survive* dalam hidup, moral, empati, dan sebagainya. Untuk itu diperlukan guru yang memiliki kompetensi yang berkenaan dengan tugas pokoknya maupun dengan tugas tambahan lainnya. Syah (1999:229) menyatakan, bahwa, “Guru yang berkualitas adalah guru yang berkompetensi, yang berkemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak”. Pengertian tentang kompetensi Guru dijelaskan di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 sebagai “... seperangkat pengetahuan,

ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”.

Meskipun Undang-undang no 14 tahun 2005 mengisyaratkan bahwa guru harus memiliki kompetensi tetapi kenyataannya masih banyak guru yang berkompentensi rendah. Rendahnya kompetensi ini bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal guru. Sutermeister (Sugiyono, 2007:27) menggambarkan faktor-faktor tersebut diantaranya: “latihan dan pengalaman kerja, pendidikan, sikap kepribadian, organisasi, para pemimpin, kondisi sosial, kebutuhan individu, kondisi fisik tempat kerja, kemampuan, motivasi kerja, dan sebagainya”.

Guru bukan hanya dituntut untuk menguasai ilmu mengajar saja tetapi juga ilmu mendidik, serta pengetahuan lainnya yang menunjang tugas pokoknya. Sebagai guru dan sebagai pribadi serta sebagai bagian dari masyarakat tindak-tanduk guru menjadi perhatian masyarakat, untuk itu guru harus memiliki kompetensi yang paripurna. Berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki guru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dinyatakan bahwa :

Kompetensi yang harus dimiliki oleh Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung.

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut guru dituntut memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Keempat kompetensi ini harus melekat pada diri individu seorang guru. Sebagai

tenaga pendidik dan pengajar kompetensi pedagogik merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki seorang guru, karena tanpa menguasai pedagogik bagaimana ia bisa melakukan proses pembelajaran dengan benar. Secara sederhana pedagogik adalah “Ilmu yang mempelajari proses belajar mengajar” (Suherman,1998:1). Dengan memiliki kompetensi pedagogik guru dapat melakukan proses pembelajaran secara efektif dan efisien sehingga peserta didik dapat meraih tujuan pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan. Lebih lanjut PP no 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat (2) halaman 6 tentang Guru, menyebutkan bahwa :

Kompetensi pedagogik Guru merupakan kemampuan Guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
2. pemahaman terhadap peserta didik
3. pengembangan kurikulum/silabus
4. perancangan pembelajaran
5. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6. pemanfaatan teknologi pembelajaran
7. evaluasi hasil belajar

Sebagai individu gurupun harus memiliki sikap yang harus menjadi teladan bagi peserta didiknya, memiliki sikap kasih sayang, arif dan bijaksana dalam memutuskan suatu permasalahan, hal ini seperti yang tercantum dalam PP no74 Tahun 2007 pasal 3 ayat (2) halaman 6 yang menyebutkan bahwa :

Kompetensi Kepribadian sekurang-kurangnya mencakup :

1. beriman dan bertaqwa
2. berakhlak mulia
3. arif dan bijaksana
4. demokratis
5. mantap
6. berwibawa

7. stabil
8. dewasa
9. jujur
10. sportif
11. menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat
12. secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri
13. mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan.

Sebagai makhluk sosial guru harus pandai berkomunikasi baik dengan peserta didik, rekan kerja, atasan, orangtua siswa maupun masyarakat lainnya secara efektif dan efisien. Kompetensi sosial mempunyai hubungan yang erat dengan penyesuaian sosial dan kualitas interaksi antar pribadi. Komunikasi yang dimaksud bisa berupa lisan, tulisan, isyarat, maupun menggunakan alat teknologi komunikasi. Hal ini sesuai dengan PP no74 tahun 2008 pasal 3 ayat (2) halaman 7 menyebutkan bahwa yang dimaksud Kompetensi sosial , adalah :

1. berkomunikasi lisan, tulis, dan/atau isyarat secara santun
2. menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional
3. bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orangtua wali peserta didik.
4. menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Guru yang memiliki tugas utama mengajar, harus berupaya untuk mengalihkan pengetahuan dan keterampilan melalui penyediaan seperangkat tugas-tugas ajar. Proses belajar mengajar tercipta manakala guru menyajikan seperangkat tugas ajar dan siswa melakukan tugas ajar tersebut.

Peningkatan mutu pembelajaran sudah barang tentu tidak akan tercapai dengan sendirinya, tetapi memerlukan perhatian dan upaya dari berbagai pihak yang terkait khususnya guru itu sendiri. Kualitas pengajaran mencakup 2 (dua) aspek yakni proses dan hasil kegiatan. Berkenaan dengan kedua jenis ukuran

keberhasilan tersebut kerangka berpikir yang diterapkan untuk meningkatkan mutu pendidikan jasmani ialah bahwa hasil merupakan akibat dari proses.

Kesuksesan suatu program pengajaran akan sangat ditentukan oleh profesionalisme yang dimiliki oleh guru. Guru yang profesional memiliki kompetensi atau kemampuan mengajar dan kemampuan memfasilitasi dalam suatu proses pembelajaran. Guru yang berkompeten akan lebih mampu membawa dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif serta akan lebih mampu mengelola kelasnya dan membawa peserta didik pada pencapaian hasil belajar yang optimal. Kompetensi profesional menurut pasal 3 ayat (2) PP 74 tahun 2008 halaman 7 disebutkan, bahwa :

Kompetensi profesional berkenaan dengan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni dan budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan :

1. materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya;
2. konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang akan diampunya.

Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran dilakukan melalui berbagai pelatihan, seperti pelatihan model pembelajaran, pengembangan silabus, pembuatan materi standar, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Mengenai pentingnya peningkatan kompetensi dan kinerja guru, Soetjipto dan Kosasi (2004:55) mengemukakan sebagai berikut :

Sebagai profesional, guru harus selalu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terus menerus. Sasaran penyikapannya meliputi

penyikapan terhadap perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, peserta didik, tempat kerja, pemimpin, dan pekerjaan. Sebagai jabatan yang harus dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat, jabatan guru harus selalu dikembangkan dan dimutakhirkan. Dalam bersikap guru harus selalu mengadakan pembaruan sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan dengan meningkatkan kompetensi guru. Profesi guru harus dibina dan dikembangkan melalui organisasi profesi. Tilaar (2004:137) mengemukakan ciri-ciri dari suatu profesi sebagai berikut :

1. memiliki suatu keahlian khusus;
2. merupakan suatu panggilan hidup;
3. memiliki teori-teori yang baku secara universal;
4. mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri;
5. dilengkapi dengan kecakapan diagnostik dan kompetensi yang aplikatif;
6. memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya;
7. mempunyai kode etik;
8. mempunyai klien yang jelas;
9. mempunyai organisasi profesi yang kuat, dan
10. mempunyai hubungan dengan profesi pada bidang-bidang lain.

Berdasarkan ciri-ciri kriteria suatu profesi, maka selain adanya lembaga pendidikan guru yang menghasilkan tenaga kependidikan, dan adanya organisasi PGRI yang mengembangkan profesi guru, perlu juga dikembangkan dalam organisasi yang lebih spesifik yang dapat membantu guru khususnya guru mata pelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, dan organisasi yang dimaksud adalah Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). MGMP dapat dijadikan wadah untuk peningkatan dan pengembangan kompetensi guru. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mariana (2002:iv), bahwa :

Pengembangan kompetensi profesional guru dapat dilakukan melalui tiga kegiatan utama, yakni : 1) pembinaan intern sekolah baik dilakukan oleh Kepala Sekolah maupun oleh Pengawas SLTP; 2) memberdayakan keberadaan wadah MGMP; dan 3) mengikutsertakan guru dalam berbagai kegiatan seminar, lokakarya, dan sejenisnya.

Sebagaimana kita ketahui, MGMP merupakan suatu forum atau wadah profesional guru mata pelajaran yang berada pada suatu wilayah kabupaten/kota/kecamatan/sanggar/gugus sekolah. Ruang lingkupnya meliputi guru mata pelajaran pada SMP Negeri dan Swasta, baik yang berstatus PNS maupun non PNS. Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan "dari, oleh, dan untuk guru" dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka MGMP merupakan organisasi non struktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga lain.

Tujuan diselenggarakannya MGMP adalah untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam merencanakan, melaksanakan, dan membuat evaluasi program pembelajaran dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru profesional; meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan; untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, kondisi sekolah, dan lingkungannya; membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan sistem pengujian yang sesuai dengan mata pelajaran yang

bersangkutan; saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, simposium, seminar, diklat, *workshop* dan lain-lain sehingga berproses pada reorientasi pembelajaran yang efektif.

MGMP mengemban peran yang sangat strategis dalam upayanya menjadi wadah profesi yang dapat menjadi tempat meningkatkan kemampuannya sebagai guru. Lebih lanjut dalam buku Depdikud, (1998:23) diuraikan beberapa fungsi yang diemban MGMP sehubungan dengan tujuan dan peran di atas, yaitu:

1. Menyusun program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin;
2. Memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan MGMP secara rutin, baik di tingkat sekolah, wilayah, maupun kota;
3. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas, sehingga mampu mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di sekolah;
4. Mengembangkan program layanan supervisi akademik klinis yang berkaitan dengan pembelajaran yang efektif;
5. Mengembangkan silabus dan melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Satuan Pelajaran (Satpel), dan Rencana Pembelajaran (Renpel);
6. Mengupayakan lokakarya, simposium dan sejenisnya atas dasar inovasi manajemen kelas, manajemen pembelajaran efektif (seperti : PAKEM-Pendekatan Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan-, *joyful and quantum learning*, hasil *classroom action research*, hasil studi komparasi atau berbagai studi informasi dari berbagai nara sumber, dan lain-lain.);
7. Merumuskan model pembelajaran yang variatif dan alat-alat peraga praktik pembelajaran program *Life Skill*, baik *Broad Based Education* (BBE) maupun *High Based Education* (HBE);
8. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan MGMP Propinsi dan MGMP nasional serta berkolaborasi dengan MKKS dan sejenisnya secara kooperatif;
9. Melaporkan hasil kegiatan MGMP secara rutin setiap semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten;
10. Memprakarsai pembentukan Asosiasi Guru Mata Pelajaran (AGMP) dan menyusun AD/ART MGMP Kabupaten/Kota.

Dari paparan di muka, mau tidak mau, cepat atau lambat, disadari atau tidak, langsung atau tidak langsung, memberdayakan MGMP adalah sebuah keniscayaan. Pemberdayaan wadah MGMP pendidikan jasmani harus dilakukan, mengingat ada berbagai penyebab yang dapat menghambat dalam mewujudkan kemampuan dan kinerja guru pendidikan jasmani. Mengenai penyebab mengapa guru pendidikan jasmani kurang atau tidak mau meningkatkan kompetensinya, Ali (1988:27) mengemukakan sebagai berikut :

1. Kurangnya daya inovasi guru,
2. Lemahnya motivasi untuk meningkatkan kemampuan,
3. Ketidakpeduliannya terhadap perkembangan,
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung,

Permasalahan kompetensi guru merupakan masalah nasional sebab belum semua guru di Indonesia memenuhi syarat profesional sebagai tenaga pendidik yang ditunjukkan dengan bukti sertifikat pendidik. Hanya sebagian saja yang sudah memiliki sertifikat pendidik hasil penilaian uji sertifikasi. Khususnya di kabupaten Pandeglang kepala dinas pendidikan kabupaten, Undang Suhendar, MPd mengatakan bahwa dari 12.000 guru yang ada di kabupaten Pandeglang hanya 30% yang sudah berijazah S-1. Berdasarkan pengamatan penulis pun, guru pendidikan jasmani SMP Negeri di kabupaten Pandeglang belum semuanya memiliki kompetensi seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, hal ini dikarenakan diantaranya belum semuanya berkualifikasi Sarjana, masih berstatus honorer, sedikit sekali memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan latihan dan sejenisnya. Dengan adanya program MGMP Pendidikan Jasmani di

Kabupaten Pandeglang, guru pendidikan jasmani yang terlibat di dalamnya dapat memiliki kesempatan untuk mengembangkan kompetensinya. Pada tahun ajaran 2009/2010 pemerintah melalui LPMP Propinsi memberikan bantuan dana *block grant* kepada MGMP pendidikan jasmani SMP kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan program MGMP. Namun sayangnya tidak semua guru pendidikan jasmani SMP kabupaten Pandeglang dapat dilibatkan dalam program ini karena berbagai alasan, diantaranya terbatasnya dana bantuan, serta lokasi tiap sekolah yang memiliki jarak yang terlalu jauh. Pelaksanaan program MGMP guru penjas SMP kabupaten Pandeglang tahun ajaran 2009/2010 menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program sejenis dimasa yang akan datang dengan peserta dan materi yang lebih luas lagi.

Belum adanya evaluasi pelaksanaan program MGMP pendidikan jasmani, kabupaten Pandeglang tahun ajaran 2009/2010 serta untuk mengetahui pentingnya MGMP dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan jasmani, penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana program MGMP pendidikan jasmani tersebut dapat mengembangkan kompetensi guru (pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional) dan membandingkannya dengan yang tidak mengikuti program MGMP tersebut.

B. Rumusan Masalah

Tugas guru harus selalu aktif meningkatkan cakrawala pengetahuan agar tuntutan menjadi guru yang memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional dapat dimiliki. Usman (1995:3) mengemukakan bahwa, “Seorang guru harus peka, dan tanggap terhadap perubahan-perubahan, pembaharuan serta

ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang sejalan dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan jaman”. Oleh karena itu MGMP pendidikan jasmani sebagai organisasi profesi melalui programnya, berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru pendidikan jasmani.

Dari uraian pada latar belakang penelitian tersebut jelaslah bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi guru, diantaranya tingkat pendidikan yang dimiliki, pengalaman mengajar, kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan latihan atau penataran-penataran dan yang sejenisnya. Dari beberapa faktor tersebut yang akan diteliti adalah keterlaksanaan program MGMP pendidikan jasmani dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan jasmani. Dari identifikasi tersebut di atas permasalahan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Apakah kompetensi pedagogik guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang ?
2. Apakah kompetensi kepribadian guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang ?
3. Apakah kompetensi sosial guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang ?

4. Apakah kompetensi profesional guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang ?
5. Apakah kompetensi guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, serta supaya penelitian ini terarah, penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui apakah kompetensi pedagogik guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang.
2. Untuk mengetahui apakah kompetensi kepribadian guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang.
3. Untuk mengetahui apakah kompetensi sosial guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang.
4. Untuk mengetahui apakah kompetensi profesional guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang.

5. Untuk mengetahui apakah kompetensi guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang.

D. Asumsi Penelitian

Asumsi dapat berupa teori baik pemikiran penulis maupun orang lain. Lebih lanjut Ridwan (2008:30) mengemukakan bahwa :

Fungsi asumsi dalam sebuah tesis merupakan titik pangkal penelitian dalam rangka penulisan tesis. Asumsi dapat berupa teori, evidensi-evidensi dan dapat pula pemikiran peneliti sendiri. Apapun materinya asumsi tersebut harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya.

Dalam merumuskan asumsi-asumsi penelitian ini ditempuh melalui telaah berbagi konsep dan teori yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan MGMP terhadap kompetensi guru. Kinerja bergantung pada pengaturan kemampuan (*ability*), upaya (*effort*), dan keterampilan (*skill*) hal ini didukung oleh pendapat Hoy dan Miskell (2001:116) yang menyatakan bahwa kinerja (*performance*) = *ability x motivation*.

Kinerja ditentukan oleh kemampuan yang diperoleh dari hasil pendidikan, pelatihan, pengalaman, sedangkan motivasi merupakan perhatian khusus dari hasrat seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Hal senada dikemukakan oleh Sustermeister (1976:45) yaitu “ ... *we have recognized that employee performance depends on both motivation and ability.*”

Kompetensi merupakan bagian dari kepribadian individu yang relatif stabil, dan dapat dilihat serta diukur dari perilaku individu yang bersangkutan,

dimanapun dan dalam situasi apapun. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan dan pelatihan. Dalam Hal ini Becker, (1993:17) mengemukakan, bahwa “*Education and training are the most important investment in human capital*”.

Dalam meningkatkan kompetensinya guru bisa memanfaatkan organisasi yang relevan sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang dibentuk untuk kepentingan dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan bersama-sama. Organisasi merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, dengan demikian organisasi harus dibuat secara rasional, dalam arti dibentuk dan beroperasi berdasarkan ketentuan formal dengan memperhitungkan efisiensi dan efektivitas. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Thoha (2001:102), bahwa “Organisasi juga dipandang sebagai sebuah wadah tak terwujud yang di dalamnya terdiri dari sekelompok orang yang dengan sadar dan terikat dengan norma tertentu, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama”. Organisasi guru pendidikan jasmani yang memungkinkan untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru seperti yang diamanatkan undang-undang no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah MGMP penjas. Dalam Depdikbud (1998:3) disebutkan, bahwa :

Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara optimal.

Agar program MGMP penjas dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, perencanaan program harus disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan program harus didasarkan pada kebutuhan pokok yang

menjadi tugas guru penjas. Selain itu isi program MGMP harus mengacu kepada kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penjas. Untuk itu di dalam program MGMP harus mencakup keempat kompetensi, yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Hal ini memungkinkan karena MGMP dalam membuat programnya berdasarkan hasil musyawarah dengan berlandaskan pada tugas pokok sebagai guru. Musyawarah merupakan bentuk komunikasi yang efektif dan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kochler (Sumirat 2002:22), bahwa : ‘Faktor komunikasi turut serta mempengaruhi kinerja, antara lain karena komunikasi dilaksanakan untuk menggerakkan aktivitas organisasi seperti halnya oksigen yang digunakan manusia demi kehidupan’. MGMP penjas sebagai organisasi berkumpulnya guru mata pelajaran penjas harus senantiasa menjaga iklim organisasi yang baik agar dapat berdampak positif bagi anggotanya. Muhammad (2007:90) mengemukakan, bahwa : “Ada hubungan yang positif antara ketepatan komunikasi yang berkenaan dengan tugas, komunikasi kemanusiaan, dan komunikasi pembaharuan dengan kepuasan kerja dan hasil yang dicapai oleh pekerja”. Ini artinya semakin tinggi kepuasan komunikasi di dalam organisasi dalam hal ini MGMP, iklim organisasi akan bertambah positif, sehingga kepuasan anggota akan meningkat, dan produktivitas guru penjas yang mengikuti program MGMP akan meningkat pula.

Untuk memotivasi keaktifan guru penjas yang mengikuti program MGMP diperlukan dukungan dari kepala sekolah sebagai atasan langsungnya di sekolah, sebab dengan dukungan dari kepala sekolah yang berupa kebijakan mengizinkan guru penjas mengikuti program MGMP dengan mengatur jadwal kegiatan

belajarnya di sekolah memungkinkan guru penjas dapat mengikuti program MGMP tanpa mengganggu tugas pokoknya.

Untuk meningkatkan profesionalisme guru penjas diperlukan berbagai upaya berupa peningkatan kreativitas kerja, kinerja, dan produktivitas kerja serta berbagai bentuk pelatihan, pendidikan profesional, dan berbagai kegiatan profesional. Dalam hal ini Fattah (2000:59) mengemukakan, bahwa :

Lima upaya dalam meningkatkan kualitas guru, yaitu meningkatkan kemampuan profesional, upaya profesional, kesesuaian waktu yang dicurahkan untuk kegiatan profesional, kesesuaian antara keahlian dengan pekerjaannya, dan kesejahteraan yang memadai.

Dampak positif pelaksanaan program MGMP dapat terwujud apabila proses pelaksanaan program dirancang sesuai dengan tujuan. Pelaksanaan program yang baik dapat meningkatkan kompetensi yang dimiliki guru penjas. Peningkatan kompetensi tersebut tercermin dari perubahan pengetahuan, sikap dan perilaku serta kinerja dan prestasi kerja, karena itu program MGMP penjas dilaksanakan untuk mendukung proses pencapaian tujuan MGMP penjas melalui guru penjas yang dilibatkan dalam pelaksanaan programnya.

E. Hipotesis Penelitian

Didasari oleh asumsi penelitian di atas, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Kompetensi pedagogik guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang.

2. Kompetensi kepribadian guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang.
3. Kompetensi sosial guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang.
4. Kompetensi profesional guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP Kabupaten Pandeglang ?
5. Kompetensi guru pendidikan jasmani yang mengikuti program MGMP penjas lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak mengikuti program MGMP penjas SMP kabupaten Pandeglang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode *ex post facto*, metode ini dipergunakan karena meneliti peristiwa yang telah terjadi yaitu pelaksanaan program MGMP penjas SMP kabupaten Pandeglang yang telah dilaksanakan pada semester I tahun ajaran 2009/2010. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak kegiatan pelaksanaan program MGMP penjas terhadap peningkatan kompetensi guru penjas, yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional kemudian dibandingkan dengan guru penjas yang tidak mengikuti program MGMP. Sugiyono (1999:7) mengemukakan bahwa “Penelitian *ex post facto* adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah

terjadi dan kemudian melihat ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut”.

G. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah SMP Negeri yang berada di wilayah kabupaten Pandeglang Propinsi Banten.

2. Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah semua guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang mengajar di SMP Negeri kabupaten Pandeglang sebanyak 78 orang. Sampel penelitiannya terdiri dari 24 orang guru penjas yang mengikuti program MGMP dan 24 orang guru penjas lainnya yang tidak mengikuti program MGMP pendidikan jasmani SMP kabupaten Pandeglang tahun ajaran 2009/2010.